

RESISTANCE TO CHANGE: PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PELAKSANAAN PILKADES BERBASIS *E-VOTING* DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Fauzan Hidayat¹
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh
Fauzan9130@gmail.com

Abstract

This research is a study of policy implementation that focuses on resistance to the changes in pattern of village heads general election (pilkades) policy from the conventional to the electronic way (e-voting). The study began with a demonstration against this policy conducted by a number of village heads in Sleman Regency. The e-voting system in the pilkades is not a new thing in the history of democracy in Indonesia. Some districts such as Jembrana, Boyolali, Pemalang, Musi Rawas and other regions have implemented this new pattern of elections without any significant problems especially in the form of resistance from the community.

This study uses a qualitative descriptive method, by describing what is expressed by the informant of a phenomenon that occurs in the midst of the community in addressing such technology adoption (e-voting). Based on the results of this study were found two categories of reasons for rejection: objective reasons and subjective reasons, namely: objective reasons and subjective reasons, including: (1) Objective Reasons: Not Easy, Economic Threats, Damaging Regulatory Values, and Fear of Loss of Status and Power. (2) Subjective Reasons: Fear of Failure, Damaging Cultural Values, and Low Trust.

Those reasons are in harmony with the nine causes of resistance to change as stated by Gary A. Yukl in his book entitled "Leadership in Organization" (2010). Nine reasons for the emergence of the Resistance writers made the foundation of theory in reviewing the rejection factor to the policy of the Pilkades e-voting.

Keywords: *resistance, e-voting, pilkades, change, policy*

Abstrak

Naskah ini merupakan kajian implementasi kebijakan yang berfokus pada resistensi terhadap rencana perubahan kebijakan pemilihan umum kepala desa (Pilkades) dari cara konvensional ke cara elektronik (*e-voting*). Studi ini dilakukan berawal dari adanya unjuk rasa menolak rencana pelaksanaan Pilkades berbasis *e-voting* yang dilakukan oleh sejumlah kepala desa dalam Kabupaten Sleman. Sistem *e-voting* dalam Pilkades bukan merupakan hal baru dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Beberapa kabupaten/kota seperti Jembrana, Boyolali, Pemalang, Musi Rawas dan daerah lainnya telah menerapkan pola baru pemilihan umum di tingkat desa ini tanpa permasalahan yang berarti khususnya berupa resistensi dari masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan apa yang diungkapkan oleh informan terhadap suatu fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam menyikapi rencana pelaksanaan pilkades dengan sistem *e-voting* tersebut. Berdasarkan hasil kajian ini ditemukan dua kategori sebab penolakan yaitu: alasan objektif dan alasan subjektif, diantaranya : (1) Alasan objektif : Tidak Mudah, Ancaman Ekonomi, Merusak Tata Nilai Regulasi, dan Takut Kehilangan Status dan Kekuasaan. (2) Alasan Subjetif : Takut Gagal, Merusak Tata Nilai Budaya, dan Kepercayaan yang Rendah.

Beberapa alasan tersebut selaras dengan sembilan sebab timbulnya *resistance to change* sebagaimana yang dikemukakan oleh Gary A. Yukl dalam bukunya yang berjudul *Leadership in Organization (2010)*. Sembilan sebab timbulnya *resistance* tersebut penulis jadikan sebagai landasan teori dalam mengkaji faktor penolakan terhadap kebijakan Pilkades *e-voting* ini.

Kata Kunci : resistensi, *e-voting*, pilkades, perubahan, kebijakan

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Mahasiswa Tugas Belajar)

Naskah ini merupakan kajian implementasi kebijakan yang berfokus pada resistensi terhadap rencana perubahan kebijakan pemilihan umum kepala desa (Pilkades) dari cara konvensional ke cara elektronik (*e-voting*). Studi ini dilakukan berawal dari adanya unjuk rasa menolak rencana pelaksanaan Pilkades berbasis *e-voting* yang dilakukan oleh sejumlah kepala desa dalam Kabupaten Sleman. Sistem *e-voting* dalam Pilkades bukan merupakan hal baru dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Beberapa kabupaten/kota seperti Jembrana, Boyolali, Pemalang, Musi Rawas dan daerah lainnya telah menerapkan pola baru pemilihan umum di tingkat desa ini tanpa permasalahan yang berarti khususnya berupa resistensi dari masyarakat².

Dilihat dari Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Tahun 2018, Sleman merupakan daerah yang berada di wilayah Provinsi dengan IP-TIK tertinggi kedua di Indonesia yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)³. Artinya, secara umum tingkat akseptabilitas masyarakat Sleman terhadap TIK tentu lebih tinggi daripada daerah lainnya. Namun, kemunculan resistensi terhadap rencana penggunaan teknologi dalam

sistem Pemilu ini menjadi tanda tanya yang perlu untuk dikaji faktor penyebabnya.

Resistensi tersebut berupa penolakan sekelompok masyarakat (para kepala desa) terhadap rencana pelaksanaan pilkades berbasis *e-voting* tersebut sehingga penerapan pilkades ini akan menemui tantangan besar bagi pemerintah setempat untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat pemilih guna menambah pengetahuan yang lebih baik tentang tujuan dan sasaran pelaksanaan kebijakan pilkades berbasis *e-voting* ini. Hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan yang menarik untuk diteliti, yaitu : Apa saja faktor-faktor penyebab penolakan sejumlah masyarakat terhadap Rencana Pemanfaatan *Electronic-Voting* dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

TINJAUAN PUSTAKA

Guna lebih mendapatkan rujukan yang komprehensif terkait dengan resistensi terhadap kebijakan, kajian terkait penelitian terdahulu dalam Bab ini dipaparkan dalam dua konsep resistensi, yaitu : resistensi terhadap pemanfaatan teknologi dan

² Firmansyah, B. (2016). Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2016. *Jurnal Fisipol - UNDIP*.

³ BPS. (2018, Desember 17). *Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informai dan Komunikasi (IP-YIK)*. Diakses pada tanggal 12 Februari 2020, dari Badan Pusat

Statistik:
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/12/17/1532/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi--ip-tik--indonesia-tahun-2017-sebesar-4-99-pada-skala-0---10.html>

resistensi terhadap perubahan secara umum.

Resistensi terhadap pemanfaatan teknologi secara umum bersumber dari dua alasan (Desmet & Parente, 2014), yaitu :

- Ancaman ekonomi, karena mengurangi pendapatan para pekerja; dan
- Anggapan bahwa pemanfaatan teknologi tidak memberikan keuntungan yang berarti bagi perusahaan/organisasi.

Adapun resistensi terhadap pemanfaatan teknologi *e-voting* secara khusus menurut para ahli disebabkan oleh beberapa hal. Cheeseman dkk (2018) mengemukakan bahwa peluang untuk praktik korupsi yang lebih besar dari sebelumnya, tingginya biaya yang dibutuhkan, inefektivitas *e-voting* yang cenderung lebih tinggi karena kesiapan SDM khususnya di negara-negara berkembang yang belum memadai; menjadikan sistem *e-voting* ini dapat menimbulkan berbagai dampak reaksi dari masyarakat selaku objek kebijakan, diantaranya adalah resistensi. Sedangkan di negara-negara maju, dua aspek sekuritas (*Receipt-Freenes* dan *Coercion Resistance*) harus lebih diperhatikan karena ancaman terhadap aspek tersebut cukup tinggi. Semakin tinggi tingkat proteksi terhadap kedua aspek pokok tersebut, semakin tinggi pula *trust* dan tingkat akseptabilitas

masyarakat untuk menerima perubahan dalam pola pemilihan (*e-voting*). *Receipt-Freenes* adalah ciri khas sistem *e-voting* dimana pemilih tidak mendapatkan bukti tanda terima yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa ia telah memberikan suaranya. Adapun *Coercion Resistance* merupakan kebebasan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya tanpa adanya pemaksaan dari pihak tertentu (Suwitom & Dutta, 2019).

Alvarez dkk (2018) dan Liu & Zhao (2018) menyimpulkan pula bahwa aspek keamanan dan kenyamanan merupakan hal pokok yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah kebijakan pemanfaatan *e-voting* dalam pemilu. Karena dengan memastikan adanya verifikasi atas hasil pilihan pemilih dan dapat diaudit secara independen, dan dengan memberikan kemudahan pemanfaatan perangkat *e-voting* bagi pemilih dalam menentukan pilihannya; dapat meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap sistem tersebut sehingga potensi resistensi dapat dihindari.

Resistensi terhadap perubahan secara umum dalam skala lokal (Indonesia) juga bersumber dari berbagai latarbelakang alasan. Marunduh (2004) dan Atmadja (2006) mengungkapkan dari sisi politik bahwa sebab resistensi terhadap suatu kebijakan muncul karena : faktor budaya (adanya tatanan norma dalam masyarakat

yang tidak diindahkan), komunikasi, dan faktor kualitas SDM. Dari sisi ekonomi, Kautsary (2005) dan Pamungkas (2007) menyimpulkan bahwa resistensi dapat terjadi disebabkan oleh keterbatasan informasi, *intrust* terhadap kinerja birokrasi, ancaman terhadap ekonomi dan kurangnya koordinasi dan sosialisasi.

Faktor-faktor penghambat tersebut sejalan dengan sembilan fenomena yang menyebabkan munculnya penolakan terhadap perubahan sebagaimana yang ditegaskan oleh Gary A. Yukl (2010) dalam karyanya yang berjudul *Leadership in Organization* bahwa lima diantaranya yang terkait dengan hasil tinjauan literatur diatas adalah *lack of trust, fear of personal failure loss and status and power, economic threats, threat to values and ideals* dan *resentmen of inference* sehingga faktor-faktor ini penulis jadikan sebagai landasan awal untuk menuntun penulis guna mengetahui secara umum penyebab masyarakat menolak perubahan pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem *e-voting* di Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data yang dikumpulkan

berupa kata-kata tertulis atau keterangan lisan dari orang-orang yang berhubungan dengan rencana pelaksanaan pilkades *e-voting*. penulis mengambil lokasi Kabupaten Sleman sebagai unit penelitian, sedangkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong penolakan masyarakat terhadap rencana kebijakan baru tersebut, penelitian dilakukan di beberapa Desa yang akan melaksanakan pilkades dalam Kabupaten Sleman. penulis melakukan pengambilan data berupa wawancara dari tokoh-tokoh masyarakat yang merupakan *key person* dari desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades dengan karakteristik Desa Maju dan Desa Tertinggal serta Desa dengan Jarak Terdekat dengan Ibukota Kabupaten dan Desa dengan Jarak Terjauh dengan Ibukota Kabupaten.

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer - diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara terhadap informan - dan data sekunder - diperoleh dari kajian literatur atau referensi yang ada berupa jurnal, buku-buku, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta informasi dari media cetak maupun elektronik. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisa data melalui prosedur mengolah,

menggambarkan, mengklasifikasi, membaca, menginterpretasi dan menyajikan data (Creswell, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data terkait dengan faktor pendorong penolakan rencana pelaksanaan Pilkades berbasis *e-voting* ini menunjukkan bahwa dari tiga subjek – Masyarakat Elit, Masyarakat Proletar, dan

Tokoh Masyarakat – resistensi tersebut diperoleh hasil berikut :

- Masyarakat Elit menolak kebijakan pemanfaatan *e-voting* karena enam faktor, diantaranya adalah : (1) Khawatir akan kegagalan, (2) Perubahan tidak mudah, (3) Ancaman ekonomi, (4) Merusak tata nilai, (5) Biaya yang tinggi, dan (6) Kepercayaan yang rendah.

Tabel 1

Hasil Pengumpulan Data terkait Faktor Penolakan terhadap Perubahan berdasarkan Desa dengan Indikator Jarak dan Ekonomi

FAKTOR	Takut Gagal	Tidak Mudah	Ancaman Ekonomi	Merusak Tata Nilai	Biaya Tinggi	Kepercayaan Rendah
KARAKTERISTIK DESA	Maju dan Terdekat	Maju dan Terdekat	Maju dan Terdekat	Terdekat dan Tertinggal	Maju dan Terjauh	Tertinggal dan Terjauh
		Maju dan Terjauh				
	Maju dan Terjauh	Terdekat dan Tertinggal		Tertinggal dan Terjauh	Terdekat dan Tertinggal	
		Tertinggal dan Terjauh				

- Masyarakat Proletar pada umumnya tidak menolak kebijakan pemanfaatan *e-voting* dalam Pilkades serentak Kabupaten Sleman ini, mereka menyadari fakta bahwa kemajuan TIK semakin berkembang pesat dan menuntut kemampuan adaptasi yang

tinggi dari masyarakat. Optimisme tersebut sejalan dengan hasil survey BPS 2018 yang menyatakan bahwa Sleman berada di wilayah provinsi dengan indeks pembangunan TIK tertinggi kedua di Indonesia.

- Sebagai besar Tokoh Masyarakat menganggap bahwa alasan utama daripada para kepala desa –yang mayoritasnya *incumbent*- ini menolak kebijakan tersebut adalah tidak lain karena adanya kekhawatiran tidak dapat memenangkan kembali kontestasi Pilkades tersebut di periode selanjutnya dimana memang sudah menjadi rahasia umum bahwa para *incumbent* tersebut memiliki banyak “sumber daya” yang mendukung pencalonannya kembali untuk memenangkan kompetisi demokrasi level desa ini. Namun, dengan kehadiran *e-voting* justru akan menutup semua “fasilitas” tersebut karena semua kandidat akan berkompetisi sesuai dengan potensi dasar yang dimiliki masing-masing.

Berdasarkan hasil analisa terhadap faktor pendorong penolakan/*resistance* terhadap rencana pemanfaatan *e-voting* Pilkades di Kabupaten Sleman, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab penolakan tersebut muncul dari tujuh alasan dalam dua kategori, diantaranya :

1. Alasan Objektif, yaitu :

- a. Keyakinan bahwa perubahan pola pemilihan tidak mudah dilakukan
Keyakinan tersebut dibangun atas asumsi bahwa dua kelompok masyarakat –lansia dan tunanetra –

tidak akan berpartisipasi karena lansia tidak mudah untuk menerima perubahan pola pemilihan dan tidak adanya fasilitas huruf *braille* bagi tunanetra. alasan tersebut cukup objektif melihat berbagai fakta dan data dari pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan pemilihan umum berbasis teknologi ini dengan bentuk permasalahan yang sama.

- b. Ketakutan akan ancaman ekonomi
Pengurangan tenaga penyelenggara Pilkades dari Desa adalah suatu kepastian sehingga kekhawatiran terhadap hilangnya pendapatan sebagian masyarakat tersebut merupakan hal yang wajar. Terlebih Pemda akan mengikutsertakan pihak akademisi guna kelancaran pelaksanaan Pilkades. Alasan ini dibuktikan sebagai alasan yang objektif yang bersumber dari masyarakat elit (Kepala Desa) yang menilai bahwa pemberdayaan kuantitas SDM dari Desa sebagai pelaksana Pilkades berbasis *e-voting* ini akan berkurang dengan kehadiran *e-voting system* dan dengan keterlibatan pihak akademisi yang secara teknis operasional memiliki peran yang tidak jauh berbeda dengan panitia Pilkades pada umumnya.

- c. Merusak tatanan nilai (Regulasi)
Persoalan kerahasiaan yang menjadi prinsip penyelenggaraan Pemilu merupakan masalah yang dialami hampir setiap negara yang memanfaatkan sistem *e-voting* dalam pemilihan umumnya. Sedangkan permasalahan yang sangat mendasar dalam sistem tersebut adalah bagaimana memastikan pilihan *voter* itu terjaga kerahasiaannya dan dapat tetap dihitung secara benar oleh perangkat mesin elektronik. Oleh karenanya, faktor resistensi yang bersumber dari persepsi bahwa adanya nilai regulasi yang dilanggar oleh kehadiran *e-voting* dalam Pilkadaes ini merupakan alasan yang objektif.
 - d. Biaya *e-voting* yang relatif tinggi
Biaya pengadaan barang perangkat *e-voting* sangat besar adalah alasan yang cukup logis. Terlebih apabila dibandingkan dengan biaya pemilu berbasis konvensional yang persentasenya mencapai 700% lebih murah daripada *e-votingi*. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa sebab resistensi yang bersumber dari persepsi bahwa biaya *e-voting* yang relatif tinggi ini adalah alasan yang objektif.
 - e. Takut kehilangan status dan kekuasaan.
Sebab resistensi yang bersumber dari adanya ketakutan akan kehilangan status dan kekuasaan ini merupakan opini para tokoh masyarakat yang penulis jadikan sumber data primer dalam penelitian ini. Tokoh masyarakat tersebut adalah yang *independent* dari eskalasi politik pemerintahan desa, namun mereka juga adalah mereka yang memahami dengan baik perkembangan politik khususnya desa-desa yang akan melaksanakan kontestasi Pilkadaes di Kabupaten Sleman. Oleh karenanya, data yang diperoleh berupa sebab resistensi masyarakat elit yang berangkat dari adanya kekhawatiran akan kehilangan status dan kekuasaan ini dapat disimpulkan sebagai alasan yang cukup objektif .
2. Alasan Subjektif, yaitu:
 - a. Khawatir akan kegagalan pelaksanaan *e-voting system*
Faktor penolakan dari sisi kekhawatiran ini merupakan alasan subjektif dari Masyarakat Elit/Para Kepala Desa. Dua aspek yang dipertimbangan atas alasan ini, yaitu SDM dan SDP yang tidak memadai. Upaya Pemda Sleman menjalin

kerjasama dengan Pihak Akademisi (Tujuh Perguruan Tinggi) dimaksudkan untuk menyediakan pengawasan teknis di setiap tempat pemungutan suara; merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan dari aspek kesiapan SDM. Pemda juga telah melakukan kerjasama dengan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai afirmasi *e-voting* dari sisi sumber daya peralatan untuk menjamin akurasi dan keamanan sistem; sebagai jawaban atas permasalahan SDP.

b. Merusak tatanan nilai (Budaya)

Pertimbangan kondisi sosio-kultural masyarakat yang tidak akrab dengan hal-hal yang bersifat komputerisasi merupakan alasan yang cukup subjektif. Karena dalam sistem *e-voting* justru lebih memudahkan pemilih dalam menentukan pilihannya hanya dengan menyentuh atau menekan gambar calon kandidat pilihannya. Hal tersebut merupakan perkara yang mudah untuk didukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi. Terlebih Pemda setempat telah melakukan upaya antisipasi terhadap potensi permasalahan tersebut dengan melibatkan pihak akademisi yang berperan dalam pendampingan dan

pengawasan teknis di setiap tempat pemungutan suara.

c. Kurangnya kepercayaan terhadap sisi positif sistem *e-voting*.

Munculnya resistensi yang bersumber dari kurangnya kepercayaan terhadap sisi positif sistem *e-voting* ini merupakan alasan yang subjektif. Alasan tersebut dikategorikan subjektif karena semua faktor pendorong resistensi dari jenis ini terbantahkan dan data dan fakta terkait dengan pemanfaatan *e-voting* Pilkadaes dari sisi positifnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari fenomena penolakan terhadap kebijakan Pilkadaes berbasis *e-voting* yang dilakukan oleh para Kepala Desa tersebut. Melalui metode kualitatif deskriptif, penulis mengambil informan dari lokasi penelitian berupa empat sampel desa dengan empat karakteristik, yaitu : Desa Maju dan Terdekat, Desa Tertinggal dan Terdekat, Desa Maju dan Terjauh, serta Desa Tertinggal dan Terjauh. Selanjutnya, penulis mengambil beberapa pendapat *key persons* dari lokasi penelitian tersebut. *Key persons* disini terdiri dari : Masyarakat elit (para kades), masyarakat proletar (awam dan

status sosial rendah) dan tokoh masyarakat yang dianggap *independent* dari eskalasi politik Desa sebagai instrumen tambahan pelengkap data yang dicari.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, ditemukan dua kategori sebab penolakan yaitu: alasan objektif dan alasan subjektif, diantaranya : (1) Alasan objektif : Tidak Mudah, Ancaman Ekonomi, Merusak Tata Nilai Regulasi, dan Takut Kehilangan Status dan Kekuasaan. (2) Alasan Subjektif : Takut Gagal, Merusak Tata Nilai Budaya, dan Kepercayaan yang Rendah.

SARAN

Berdasarkan faktor penolakan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka berikut saran yang dapat penulis tawarkan, yaitu :

- Membangun komunikasi yang intens terhadap masyarakat jauh hari sebelum dilaksanakannya perubahan Pilkadaes
- Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik khususnya rencana kebijakan pemanfaatan *e-voting*
- Menyusun perencanaan dengan sebaik-baiknya dalam hal implementasi kebijakan pemanfaatan *e-voting*
- Mengoptimalkan tingkat kepercayaan publik dengan meningkatkan integritas

birokrasi Pemda Sleman di seluruh lini dan sektor birokrasi

- Senantiasa mengedepankan asas skala prioritas dalam menetapkan suatu kebijakan demi percepatan pembangunan yang dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvarez , R., Levin , I., & Li , Y. (2018). Fraud, Convenience, and E-Voting; How Voting Experience Shapes Opinions about Voting Technology. *Journal of Information Technology & Politics*, 15(2), 94-105.
- Atmadja, J. B. (2006). *Resistensi terhadap pembentukan Majelis Rakyat Papua di Kabupaten Jayapura*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- BPS. (2018, Desember 17). *Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-YIK)*. Retrieved Februari 12, 2020 , from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/12/17/1532/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-ip-tik-indonesia-tahun-2017-sebesar-4-99-pada-skala-0---10.html>
- Desmet, K., & Parente, S. (2014). Resistance to Technology Adoption : The Rise and Decline of Guilds. *Review of Economic Dynamic*, 17, 437-458.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar .

- Cheeseman, N., Lynch, G., & Willis, J. (2018). Digital Dilemmas : The Unintended Consequences of Election Technology. *Democratization*, 25(8), 1397-1418.
- Firmansyah, B. (2016). Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2016. *Jurnal Fisipol - UNDIP*
- Kautsary, J. (2005). *Penolakan Masyarakat Pecinan Semarang terhadap Kebijakan dan Program Revitalisasi Kawasan Pecinan*. Yogyakarta: Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Liu , Y., & Zhao, Q. (2019). E-Voting Scheme Using Secret Sharing and K-Anatomy. *World Wide Web*, 22, 1657-1667.
- Marunduh, K. M. (2004). *Resistensi masyarakat adat Wana terhadap implementasi kebijakan resettlement :: Studi kasus masyarakat Adat Wana di Cagar Alam Morowali, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah*. Yogyakarta: Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Pamungkas, T. W. (2007). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penolakan Masyarakat terhadap Rencana Pemerintah Memperluas Sasaran Wajib Pajak dengan Penyebaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara Jabatan*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi - Universitas Gadjah Mada.
- Suwitom, M. H., & Dutta , S. (2019). Verifiable E-Voting with Resistance against Physical Forced Abstention Attack. *2019 International Workshop on Big Data and Information Security (IW BIS)* (pp. 85-89). Bali, Indonesia: IEEE.
- Yukl, G. (2010). *Leadership in Organization*. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.